

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) OLEH UPTD PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN

Oleh

SOHID PRIYANTO

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Wilayah UPTD Dikbudpora Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran masih rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data sebanyak 18 orang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yaitu study pustaka (literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengelolaan data kualitatif. Teknik pengolahan data pendukung dari analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian bahwa : 1) Implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini belum terlaksana dengan baik karena adanya beberapa permasalahan yang dihadapi petugas dalam melakukan pengelolaan PAUD sehingga belum sesuai dengan variabel-variabel yang mempengaruhi implemetansi kebijakan. Berdasarkan observasi diketahui bahwa dalam Penyelenggaraan PAUD belum optimal. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam Penyelenggaraan PAUD seperti kurangnya dukungan sumber dana yang memadai, kebanyakan PAUD masih menumpang di tempat lain, kurangnya peran serta masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa kebanyakan PAUD belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya anggaran yang mendukung, kurangnya sumber daya manusia yang memadai. 3) Melakukan berbagai upaya dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan cara menambah berbagai sarana dan prasarana secara bertahap, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan melaksanakan pelatihan bagi petugas pelaksana. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa dilakukan beberapa upaya dengan cara menambah berbagai sarana dan prasarana, melakukan kerjasama dan melaksanakan pelatihan bagi petugas.

Kata Kunci : Implementasi, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

PENDAHULUAN

Gencarnya program pemerintah dalam menyosialisasikan penyelenggaraan PAUD tentu saja perlu memahami penyelenggaraan PAUD yang berkualitas bagi anak usia dini. Akses yang mempermudah masyarakat dalam menyelenggarakan PAUD merupakan pijakan awal penyelenggaraan PAUD yang berkualitas akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Kesibukan orang tua telah mendorong berkembangnya penyedia layanan pendidikan anak usia dini.

Layanan pendidikan bagi anak usia dini merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 14 bahwa:

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal. Pendidikan formal seperti; Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA). Pada jalur pendidikan non formal terdapat

Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), sedangkan pendidikan anak usia dini dalam jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pembiayaan penyelenggaraan PAUD yang minim berkisar pada uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel, gaji, dan keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan PAUD serta pengadaan dan perbaikan serana dan prasarana (Novan A. Wiyani dan Barnawi, 2012:18), karena setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, sehingga pemerintah memegang peran yang penting dalam meningkatkan anggaran pembangunan yang cukup dan merata dalam pemberian layanan optimal bagi peserta didik dengan mempermudah informasi dan alur birokrasi penyaluran bantuan.

Oleh karena itu layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan bagi anak usia dini tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengalaman belajar seperti pendidikan orang dewasa, namun juga berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan kecerdasannya, sikap moral, sosial dan emosionalnya. Pendidikan ini hendaknya diartikan secara luas, mencakup seluruh proses stimulasi psikososial yang tidak terbatas pada proses pembelajaran yang dilakukan secara klasikal, artinya pendidikan dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja, baik yang dilakukan sendiri dilingkungan keluarga maupun oleh lembaga pendidikan diluar keluarga yang ikut bertanggungjawab dalam perkembangan anak usia dini (Sujarwo, 2006:73).

Peran pendidikan luar sekolah yang mencakup pendidikan non formal dan informal dalam memberikan pelayanan pendidikan dini pada anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan di jalur pendidikan formal sangatlah penting. Namun demikian keberadaan PAUD belum sesuai dengan yang diharapkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menunjang keberadaan PAUD sehingga terdapat beberapa PAUD yang tidak dapat melaksanakan fungsinya serta kebanyakan belum memiliki bangunan sendiri.

Permasalahan tersebut sesuai dengan hasil peninjauan yang dilakukan, diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Wilayah UPTD Dikbudpora Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran masih rendah, hal ini terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Masih adanya sejumlah PAUD yang kesulitan untuk mendapatkan izin operasional. Contohnya masih adanya PAUD yang masih belum memiliki standar dalam penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal.
2. Adanya sejumlah PAUD yang belum memiliki sarana maupun prasarana yang memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengikuti pendidikannya. Contohnya PAUD masih kurang memperoleh bantuan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran dan belum memiliki alat permainan edukatif dan peralatan pendukung keaksaraan.
3. Adanya sejumlah PAUD yang kurang memperoleh pembiayaan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan lembaga PAUD. Contohnya : kurangnya perhatian dari pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mendukung lembaga PAUD dalam penyelenggaraan pendidikan.

Permasalahan yang terjadi sangatlah luas dan kompleks, karena itu supaya lebih spesifik penelitian ini difokuskan pada hal berikut ini: 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran ?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Informan dalam penelitian ini yaitu 18 orang yang terdiri dari 5 pegawai yang menangani PAUD dan sebanyak 13 orang penyelenggara PAUD baik formal maupun informal di Wilayah Kecamatan Kalipucang. Teknik pengumpulan data adalah :

- a. Study Pustaka (*Literature study*)
- b. Studi Lapangan:
 1. Observasi
 2. Wawancara (*interview*)

LANDASAN TEORI

Kebijakan merupakan suatu rencana, sikap, perbuatan, himpunan keputusan dan tindakan serta pengawasan yang terorganisir, untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui penggunaan sarana-sarana tertentu, meliputi suatu waktu tertentu dengan melalui tahap-tahap tertentu.

Adapun Solichin (2008 : 112) mengemukakan bahwa : "Implementasi adalah mendesain, melaksanakan dan membangun program". Sedangkan proses implementasi menurut Solichin (2005: 65) adalah "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan."

Dari definisi tersebut tercermin bahwa suatu kebijakan pemerintah setidaknya memuat adanya penggerak dan pelaksana yang melakukan aktivitas operasional kebijakan yang dibuat, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Dalam rangka penyelenggaraan PAUD, Pemerintah telah mengeluarkan standar PAUD yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok yaitu:

- 1) Standar tingkat pencapaian perkembangan; Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik.
- 2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; Standar pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) dan tenaga kependidikan memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
- 3) Standar isi, proses, dan penilaian; dan Standar isi, proses, dan penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan kebutuhan anak.
- 4) Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan mengatur fasilitas, manajemen, dan pembiayaan agar dapat menyelenggarakan PAUD yang baik.

Sejak dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dengan Undang-Undang tersebut berlakulah era otonomi daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk segala sektor kehidupan. Termasuk pemberlakuan otonomi di sektor pendidikan yang diterapkan melalui otonomi pendidikan. Dengan otonomi pendidikan tersebut, Pemda diminta untuk ikut berperanserta dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di daerahnya. Dalam hal ini termasuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini terdiri dari tahapan yang saling berhubungan dan merupakan bagian penting bagi pencapaian tujuan tertentu dengan

menggunakan sarana-sarana tertentu, yang dijalankan atau dilaksanakan secara bertahap. Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi implemmtasi kebijakan. Adapun variabel-variabel tersebut menurut Wahab (2014:165) antara lain :

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana

4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Alat ukur tersebut dijadikan landasan/dasar untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dapatdiuraikan hasil penelitian tiap indikator tersebut di atas, maka dapat disajikan hasil rekapitulasi dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Rekapitulasi Hasil Wawancara Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran

| No | Sub Variabel | Indikator | Hasil Pembahasan | |
|----|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | Baik | Kurang Baik |
| 1 | Standar/ukuran dan tujuan kebijakan) | 1. Ukuran kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realisasi yang ada di level pelaksana kebijakan | Informan nomor 1,2,3 dan 4 (22,22%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (77.78%) menyatakan kurang baik |
| | | 2. Ukuran kebijakan dapat diukur dari pelaksana kebijakansesuai dengan petunjukPelaksanaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. | Informan nomor 1,2,3,4 dan 5(27,78%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (72.22%) menyatakan kurang baik |
| | | 3. Ukuran implementasi kebijakan dapat diukur dari kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. | Informan nomor 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 10 (50.00%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 9,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (50.00%) menyatakan kurang baik |

**Implementasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran
SOHID PRIYANTO**

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 2 | Sumber-sumber kebijakan | 1. Adanya sumber daya pelaksana yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. | Informan nomor 1,2,3, 7,8 dan 10 (33.33%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 4,5,6,9,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (66.67%) menyatakan kurang baik |
| | | 2. Adanya kemampuan pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. | Informan nomor 1,2,3,4,5,6, dan 10 (38.88%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 7,8,9,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (61.12%) menyatakan kurang baik |
| | | 3. Adanya fasilitas pendukung yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. | Informan nomor 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 10 (50.00%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 9,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (50.00%) menyatakan kurang baik |
| 3 | Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana | 1. Tersedianya jumlah tenaga pelaksana kebijakan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | Informan nomor 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 10 (50.00%) menyatakan sudah baik | informan nomor 9,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (50.00%) menyatakan kurang baik |
| | | 2. Tersedianya peralatan yang memadai untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan usia dini | Informan nomor 1,2, 6,7,8 dan 10 (33.33%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 3,4,5,9,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (66.67%) menyatakan kurang baik |
| | | 3. Tersedianya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan usia dini | Informan nomor 1,2, dan 3 (33.33%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 4,5,6,7,8,9,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (66.67%) menyatakan kurang baik |
| 4 | Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan | 1. Adanya pelibatan pegawai dalam perencanaan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | Informan nomor 1,2,3 dan 4 (22.22%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 5,6,7,8,9,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (77.73%) menyatakan kurang baik |
| | | 2. Adanya instruksi kepada pelaksana kebijakan mengenai kebijakan | Informan nomor 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 10 (50.00%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 9,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (50.00%) menyatakan kurang baik |

| | | | | |
|-----------|---|--|---|--|
| | | penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | | |
| | | 3. Adanya pembinaan yang dilakukan secara rutin dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. | Informan nomor 1,2,3,4,dan 5 (27.78%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (72.22%) menyatakan kurang baik |
| 5 | Sikap para pelaksana | 1. Adanya kesadaran dari pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | Informan nomor 1,4, dan 5 (16.67%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 2,3,6,7,8,9,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (83.33%) menyatakan kurang baik |
| | | 2. Adanya komitmen yang jelas dari pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | Informan nomor 1,2,3,8 dan 10 (27.78 %) menyatakan sudah baik | Informan nomor 4,5,6,7,9,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (72.22%) menyatakan kurang baik |
| | | 3. Adanya pegawai yang kompeten dalam melaksanakan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | Informan nomor 1,2,3,4, dan 5 (27.78%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 6,7,8 9,10,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (72.22%) menyatakan kurang baik |
| 6 | Lingkungan ekonomi, sosial dan politik) | 1. Adanya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | Informan nomor 1 dan 3 (11.11%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 2,4,5,6,7,8,9,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (88.89%) menyatakan kurang baik |
| | | 2. Adanya dukungan dari kepala UPTD dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | Informan nomor 1,2,3,4 dan 5 (27.78%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 6,7,8,9,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (72.22%) menyatakan kurang baik |
| | | 3. Adanya peraturan yang jelas dalam mengatur pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | Informan nomor 1,2,3,dan 5 (22.22%) menyatakan sudah baik | Informan nomor 4,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17dan 18 (77.78%) menyatakan kurang baik |
| Rata-rata | | | 27.78 % | 72.22 % |

Implementasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran
SOHID PRIYANTO

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar informan merasa kurang baik yaitu sebanyak (72.22%) atas implementasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi petugas dalam melakukan pengelolaan PAUD sehingga penyelenggaraan PAUD belum sesuai dengan pendapat Wahab (2014:165) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang antara lain :

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana
4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Begitupula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dikarenakan masih rendahnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendanaan pendidikan, rendahnya kemampuan ekonomi keluarga/peningkatan daya beli masyarakat; dan masih kurangnya Alokasi Pendanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya anggaran serta kurangnya sumber daya manusia yang mendukung implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa kebanyakan PAUD belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan bagi usia dini, kurangnya anggaran yang mendukung terselenggaranya kebijakan, kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan kebijakan.

Upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini hal ini dilakukan dengan memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah ada karena apabila harus mengadakan penambahan sarana dan prasarana belum dapat dilakukan, menyediakan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan PAUD serta melakukan berbagai upaya pelatihan bagi pengelola dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sehingga pengelola memiliki kemampuan yang baik.

Begitupula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa selama ini dilakukan beberapa upaya dengan cara menambah berbagai sarana dan prasarana secara bertahap sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada

masyarakat, melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mendukung terselenggaranya kebijakan dan melaksanakan pelatihan bagi petugas pelaksana sehingga dapat memahami ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi petugas dalam melakukan pengelolaan PAUD sehingga penyelenggaraan PAUD belum sesuai dengan pendapat Wahab (2014:165) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi implemntasi kebijakan. berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dikarenakan masih rendahnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendanaan pendidikan, rendahnya kemampuan ekonomi keluarga/peningkatan daya beli masyarakat; dan masih kurangnya Alokasi Pendanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
2. Adanya hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di

Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, antara lain : kurangnya dukungan sumber dana yang memadai dalam melaksanakan kebijakan sehingga kebanyakan PAUD masih menumpang di tempat lain belum memiliki tempat sendiri, kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu terselenggaranya PAUD. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa kebanyakan PAUD belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan bagi usia dini, kurangnya anggaran yang mendukung terselenggaranya kebijakan, kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan kebijakan.

3. Melakukan berbagai upaya supaya Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dapat dilaksanakan dengan baik dengan cara menambah berbagai sarana dan prasarana secara bertahap sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mendukung terselenggaranya kebijakan dan melaksanakan pelatihan bagi petugas pelaksana sehingga dapat memahami ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Begitupula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa selama ini dilakukan beberapa upaya dengan cara menambah berbagai sarana dan prasarana secara bertahap sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mendukung terselenggaranya kebijakan dan melaksanakan pelatihan bagi petugas pelaksana sehingga dapat memahami ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Kepala UPTD Pendidikan sebaiknya melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi

Implementasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
oleh UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran
SOHID PRIYANTO

- penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sehingga dapat meningkatkan terselenggaranya pendidikan anak usia dini secara optimal.
2. Penilik PLS sebaiknya dapat meningkatkan supervisi baik akademik maupun manajerial kepada pengelola PAUD sehingga dapat memperbaiki berbagai kekkuranagn dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
 3. Masyarakat sebaiknya mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini melalui memberikan bantuan baik dana maupun tenaga sehingga dapat memperlancar terselenggaranya PAUD di wilayahnya.

Wiyani&Barnawi, 2012, *Format PAUD Konsep,Karakteristik* Jakarta : Balai Pustaka.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD

Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta Ajar.
- Islami, Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:PT.Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy,. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Solehuddin. 1997. *Konsep Dasar Pendidikan Prasekolah*. Bandung : FIP IKIP Bandung
- Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudiyono. 2007. *Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Bandung : Mandar Maju
- Sudjarwo, H. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : Mandar Maju
- Sujiono, Yuliani Nuraini. 2009. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Indeks
- Surakhmad, Winarno. 2004. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Madia Pressindo.

